

# **PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PILKADA KOTA PEKANBARU TAHUN 2017**

**Fadil Anugrah Prasetyo (14010114120001)**

Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H Soedarto, SH., Tembalang, Semarang

## **ABSTRAK**

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Sebagai proses dari transformasi politik, makna pilkada selain merupakan bagian dari penataan struktur kekuasaan makro agar lebih menjamin berfungsinya mekanisme *check and balances* di antara lembaga-lembaga politik dari tingkat pusat sampai daerah, masyarakat mengharapkan pula agar pilkada dapat menghasilkan kepala daerah yang akuntabel, berkualitas, legitimate, dan peka terhadap kepentingan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Kota Pekanbaru Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *multistage random sampling* dengan menggunakan data hasil dari kuesioner.

Respon masyarakat Kota Pekanbaru dalam mengikuti pilkada tahun 2017 dapat disimpulkan tinggi dalam berpartisipasi. Faktor Rasional adalah faktor yang berpengaruh dalam partisipasi politik masyarakat Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data yang telah dikemukakan dalam penghitungan koefisien korelasi menunjukkan Kerja KPU memiliki nilai positif dengan partisipasi politik. Artinya semakin tinggi Kerja KPU maka semakin tinggi hubungan dalam Partisipasi Politik pada masyarakat Kota Pekanbaru.

Hasil kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data yang telah dikemukakan dalam penghitungan koefisien korelasi Faktor Sosiologis tidak ada hubungan signifikan dengan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Kota Pekanbaru. Faktor Psikologis ada hubungan signifikan dengan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Kota Pekanbaru. Faktor Rasional ada hubungan signifikan dengan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Kota Pekanbaru. Faktor Administrasi DPT ada hubungan signifikan dengan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Kota Pekanbaru. Faktor Kerja KPU ada hubungan signifikan dengan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Kota Pekanbaru. Faktor Kerja Calon ada hubungan signifikan dengan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Kota Pekanbaru.

Kata kunci : Partisipasi Politik, Pilkada

PARTICIPATION OF SOCIETY IN THE ELECTION SIMULTANEOUSLY  
THE CITY OF PEKANBARU IN 2017

**Fadil Anugrah Prasetyo (14010114120001)**

Department of Political and Government, at the Faculty of Social and Political  
Science.

University of Diponegoro

The Prof. H. Soedarto, SH., Tembalang, Semarang.

ABSTRACT

Participation in politics is a vital aspect in a fabric of democracy, as well as are the hallmark of the modernization of politics. As the process of transformation of politics, the meaning of the election besides being a part of the arrangement of the power structure of the central bank to ensure does it do the mechanism of checks and balances between political institutions of the central level to the area, people expect also that elections can produce regional heads who are accountable, quality, legitimate, and sensitive to the public interest. This study aims to determine the factors that affect the political participation of society in local elections in the city of Pekanbaru year 2017. This study using the kind of research ekspanatori with quantitative. The samples used in this study is a multistage random sampling by using the data from questionnaires.

The response of the Pekanbaru City in the election in 2017 can be concluded in participating, you know Rational is an influential factor in political participation of the city of Pekanbaru. Based on the results of the processing and analysis of data that has been raised in the calculation of coefficient of the correlation to the Working Group on the Commission has a positive value to political participation. This means that the higher the Working Group on the Commission the higher the relationship in the Participation of the city of Pekanbaru.

The results of the conclusions in this study based on the results of processing and analyzing the data that has been stated in the calculation of the correlation coefficient of Sociological Factors there is no significant relationship with Community Political Participation in Pekanbaru City Election. Psychological factors have a significant relationship with Community Political Participation in Pekanbaru City Election. Rational Factors have a significant relationship with Community Political Participation in Pekanbaru City Election. The DPT Administration factor has a significant relationship with the Community Political Participation in the Pekanbaru City Election. The Working Factors of KPU have a

significant relationship with Community Political Participation in Pekanbaru City Election. Working Factors Candidates have a significant relationship with Community Political Participation in Pekanbaru City Election.

Key words: Political Participation, Elections.

## **PENDAHULUAN**

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Secara umum dalam masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga negara dalam ikut serta memengaruhi pengambilan keputusan, dan memengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Warga negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik.

Partisipasi politik rakyat tentu tak lepas dari kondisi atau sistem politik yang sedang berproses. Sistem kepolitikan bangsa Indonesia hingga dewasa ini telah berkali-kali mengalami perubahan, mulai dari orde baru sampai pada reformasi. Disadari bahwa reformasi sering dimaknai sebagai era yang lebih demokratis. Sebagai proses dari transformasi politik, makna pilkada selain merupakan bagian dari penataan struktur kekuasaan makro agar lebih menjamin berfungsinya mekanisme *check and balance* di antara lembaga-lembaga politik dari tingkat pusat. Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) yang sesuai dengan peraturan per-undangundangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) dalam mengatur pemerintahan sendiri terutama dalam hal Pemilu dan Pemilukada. Undang-undang ini sesuai Pasal 22E UUD 1945. Yaitu bahwa Pemilihan Kepala Daerah baik untuk tingkatan Gubernur, Bupati, Walikota serta para wakilnya di tentukan oleh adanya pemilihan secara langsung oleh rakyat yang berasaskan pada langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pada pemilihan kepala daerah Kota Pekanbaru tahun 2017, dari jumlah Daftar Pemilih Tetap 569.744 orang, dengan jumlah pemilih laki-laki 265.016 dan jumlah pemilih perempuan 267.027, tetapi yang menggunakan hak pilih hanya sebesar 295.402 orang, dapat dikatakan tingkat partisipasi pemilih masyarakat kota pekanbaru masih cukup rendah, yakni 51,9 persen. Berdasarkan permasalahan diatas, maka dalam tulisan ini akan dibahas beberapa poin, yaitu faktor internal dan faktor eksternal pemilih akan mempengaruhi seseorang dalam berpartisipasi.

## **LANDASAN TEORI**

### **Partisipasi Politik**

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi adalah bahwa setiap orang

mengetahui diri dan dunianya secara lebih baik daripada orang lain termasuk para ahli elite politik yang membuat keputusan.<sup>1</sup>

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik**

#### a. Faktor Sosiologis

Seseorang tidak ikut dalam pemilihan dijelaskan sebagai akibat dari latar belakang sosiologis tertentu, seperti agama, pendidikan, pekerjaan, ras dan sebagainya. Faktor jenis pekerjaan juga dinilai bisa mempengaruhi keputusan orang ikut pemilihan atau tidak.

#### b. Faktor Psikologis

Keputusan seseorang untuk ikut memilih atau tidak ditentukan oleh kedekatan dengan partai atau kandidat yang maju dalam pemilihan. Makin dekat seseorang dengan partai atau kandidat tertentu makin besar kemungkinan seseorang terlibat dalam pemilihan.

#### c. Faktor Rasional

Faktor ini menyatakan keputusan untuk ikut memilih atau tidak dilandasi oleh pertimbangan rasional, seperti ketidakpercayaan dengan pemilihan yang bisa membawa perubahan lebih baik, atau ketidakpercayaan masalah akan bisa diselesaikan jika pemimpin baru terpilih dan sebagainya. Pemilih yang tidak percaya dengan pemilihan akan menciptakan keadaan lebih baik, cenderung tidak ikut memilih.

#### d. Situasi

Situasi politik juga dipengaruhi oleh keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung seperti cuaca, keluarga, kehadiran orang lain, keadaan ruang, suasana kelompok, dan ancaman.<sup>2</sup>

#### e. Afiliasi Politik Orang Tua

Afiliasi berarti tergabung dalam suatu kelompok atau kumpulan. Afiliasi politik dapat dirumuskan sebagai keanggotaan atau kerjasama yang dilakukan individu atau kelompok yang terlibat ke dalam aliran-aliran politik tertentu. Afiliasi politik mendorong tumbuhnya kesadaran dan kedewasaan politik masyarakat untuk menggunakan hak politiknya secara bebas dan bertanggungjawab dalam melakukan berbagai aktifitas politik, seperti ikut dalam partai politik dalam pemerintahan, ikut dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan politik.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ardial. 2010. *Komunikasi Politik*. Jakarta: Indeks. Hal. 64

<sup>2</sup> Ramlan Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia

<sup>3</sup> B.N. Marbun. 1996. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

#### f. Faktor Administrasi DPT

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap besarnya angka golput dalam suatu pemilihan bahwa karena statusnya sebagai pendatang dengan tempat tinggal yang tidak tetap menyebabkan seseorang terdaftar di tempat lain namun pada saat pemilu sudah berada di tempat tinggal lainnya dalam momentum pemilihan. Pengaruh administrasi terhadap tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada yaitu diakibatkan oleh adanya pemilih ganda, pemilih yang sudah berpindah tempat tinggal ataupun sudah meninggal namun masih terdaftar dalam DPT. Selain faktor mengenai pemilih yang berpindah tempat tinggal dan yang sudah meninggal, faktor administrasi ini juga menyangkut terhadap pemilih yang tidak mendapatkan kartu undangan untuk datang ke TPS sehingga tidak menggunakan hak suara yang dimiliki. Faktor administrasi adalah faktor yang berhubungan dengan aspek administrasi pemilih yang dalam prakteknya tentu sangat menentukan tingkat partisipasi pemilih. Bahwa apabila administrasinya buruk maka tentu akan berdampak pada tidak berkesempatannya seseorang untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan.

#### g. Peran KPU

KPU sebagai penyelenggara tentunya bertanggung jawab langsung terhadap kesuksesan pelaksanaan Pemilu baik dari tingkat Nasional hingga ke tingkat kabupaten/kota. Program dan strategi yang dikembangkan oleh KPU sebagaimana di tingkat nasional melalui iklan di media masa, baik cetak maupun elektronik telah menggugah dan mengingatkan pemilih untuk dengan kesadaran dan dengan penuh rasa tanggungjawab menantikan waktu pelaksanaan pemilihan umum dan pada saatnya mereka meringankan langkah untuk mendatangi TPS untuk mencoblos sesuai pilihan hati nurani mereka. Bentuk-bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota melalui brosur, pamflet, kaos tolak golput dan sejumlah aksi kebersamaan bersama kontestan peserta pemilu dengan karnaval dan deklarasi kampanye damai telah juga mempengaruhi pemilih untuk melihat Pemilu sebagai suatu momentum yang penting dan strategis dalam penentuan masa depan Bangsa dan negara yang dicita-citakan.

Pentingnya kegiatan sosialisasi mengingat pemahaman tentang eksistensi Pemilu sendiri membutuhkan proses tranfer informasi dan pengetahuan untuk membentuk kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pemungutan suara. Tanpa sosialisasi sebagian orang akan memandang pemilu sebagai kegiatan pemungutan suara biasa yang tidak berdampak terhadap kehidupannya.

#### h. Kerja Calon

Salah satu kerja calon yaitu kampanye, Kegiatan kampanye politik tidak lepas dengan adanya sebuah partai politik yang ikut mengusung dan mendukung berjalannya kegiatan kampanye politik. Dalam kampanye politik perlu adanya dukungan dan langkah strategi yang matang dalam berkampanye, kampanye politik para kandidat calon dalam melakukan pembentukan opini publik melalui proses komunikasi politik yang dimulai dari setiap opini individu. Setiap pesan atau

masalah pembicaraan politik yang menyentuh individu itu dapat diterima atau ditolak oleh individu lainnya. Kemudian sosialisasi dan pendekatan dari calon kandidat dengan masyarakat akan mempengaruhi partisipasi masyarakat, ketika sosialisasi politik dari kandidat calon tidak berjalan dengan baik, akibatnya ada sebagian pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan alasan karena tidak tahu siapa pasangan calon yang harus dipilih.

Menurut Damsar dalam Buku Sistem Politik Indonesia, selain status sosial ekonomi ada Variabel lain yang mempengaruhi partisipasi politik seperti aspek gender, budaya politik, kepemimpinan informal, dan tingkat kekecewaan terhadap realitas yang ada, termasuk realitas pemerintahan dan politik.

## **METODOLOGI**

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan tipe eksplanatori. Adapun jenis penelitian ini digunakan untuk menguji hipotesis dan menjelaskan hubungan antar variabel, yaitu partisipasi politik, faktor internal dan faktor eksternal dalam partisipasi politik masyarakat Kota Pekanbaru dalam Pilkada tahun 2017.

## **PEMBAHASAN**

### **Identitas Responden**

Tabel 3.1

Responden berdasarkan Usia

No	Usia	Frekuensi	Persentase
1	<20 Tahun	3	2,5%
2	20-29 Tahun	32	26,7%
3	30-39 Tahun	45	37,5%
4	40-49 Tahun	30	25%
5	50-59 Tahun	10	8,3%
	Jumlah	120	100%

Sumber : Hasil setelah diolah dari kuesioner mengenai identitas responden

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 120 responden yang dijadikan sampel penelitian terdapat 3 orang atau 2,5% responden yang berusia kurang dari 20 tahun. Kemudian sebanyak 32 orang atau dengan persentase 26,7% responden berusia 20-29 tahun. Untuk responden berusia 30-39 tahun dengan persentase 37,5% terdapat 45 orang. Terdapat 30 orang yang berusia 40-49 tahun dengan persentase 25%, dan untuk responden yang berusia 50-59 tahun berjumlah 10 orang dengan persentase 8,3%. Menurut BPS, usia produktif berada pada rentang 15-64 tahun. Maka berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berada pada usia produktif.

Tabel 3.2

## Responden berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	43	35,8%
2	Perempuan	77	64,2%
		120	100%

Sumber : Hasil setelah diolah dari kuesioner mengenai identitas responden

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah masyarakat yang dijadikan sampe dalam penelitian mengenai Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilkada Serentak Kota Pekanbaru sebesar 120 orang. Responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 77 orang dengan persentase 64,2% dan laki-laki sebanyak 43 orang dengan persentase 35,8%.

Tabel 3.3

## Responden berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1	PNS	13	10,8%
2	Swasta	43	35,8%
3	Mahasiswa/pelajar	12	10%
4	Guru	8	6,7%
5	Pedagang	20	16,7%
6	Petani	2	1,7%
7	Ibu rumah tangga	20	16,7%
8	Belum/tidak bekerja	2	1,7%
	Jumlah	120	100%

Sumber : Hasil setelah diolah dari kuesioner mengenai identitas responden

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas responden berasal dari pekerja swasta sebesar 35,8% atau sebanyak 43 orang. Responden terbanyak selanjutnya berasal dari pedagang dan ibu rumah tangga yang sama-sama memperoleh persentase 16,7% atau sebanyak 20 orang. Responden selanjutnya yaitu PNS sebanyak 13 orang dengan persentase 10,8%. Selanjutnya dari mahasiswa/pelajar sebanyak 12 orang dengan persentase 10%, profesi guru sebanyak 8 orang dengan persentase 6,7%, setelah itu dari petani sebanyak 2 orang

dengan persentase 1,7% dan terakhir belum/tidak bekerja sebanyak 2 orang dengan persentase 1,7%.

Tabel 3.4

Responden berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	Tidak sekolah	2	1,7%
2	SD	3	2,5%
3	SMP	18	15%
4	SMA	47	39,2%
5	Diploma	17	14,2%
6	S1	33	27,5%
	Jumlah	120	100%

Sumber : Hasil setelah diolah dari kuesioner mengenai identitas responden

Berdasarkan tingkat pendidikan responden, mayoritas responden yaitu tamatan SMA sebanyak 47 orang dengan persentase 39,2%, selanjutnya responden terbanyak kedua dari tamatan Sarjana dengan persentase 27,5% sebanyak 33 orang. Responden dengan tamatan smp sebanyak 18 orang dengan persentase 15%, kemudian tamatan Diploma dengan persentase 14,2% sebanyak 17 orang, terakhir responden dengan tamatan SD sebanyak 3 orang dan tidak sekoah sebanyak 2 orang.

Tabel 3.5

Responden berdasarkan Agama

No	Agama	Frekuensi	Persentase
1	Islam	108	90%
2	Katolik	10	8,3%
3	Protestan	2	1,7%
	Jumlah	120	100%

Sumber : Hasil setelah diolah dari kuesioner mengenai identitas responden

Berdasarkan tabel diatas dapat di lihat bahwa responden terbanyak beragama islam dengan jumlah persentase 90% atau sebanyak 108 orang, kemudian untuk agama katolik sebanyak 10 orang dengan persentase 8,3%. Terakhir, protestan sebanyak 2 orang dengan jumlah 1,7%.



Tabel 3.6  
Responden berdasarkan Pendapatan

No	Pendapatan	Frekuensi	Persentase
1	< 500.000	8	6,7%
2	500.000 - < 1.000.000	12	10%
3	1.000.000- < 2.000.000	10	8,3%
4	2.000.000 - < 3.000.000	27	22,5%
5	3.000.000- < 4.000.000	33	27,5%
6	4.000.000 - < 5.000.000	12	10%
7	5.000.000 - < 6.000.000	12	10%
8	> 6.000.000	6	5%
	Jumlah	120	100%

Sumber : Hasil setelah diolah dari kuesioner mengenai identitas responden

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui, mayoritas responden berpenghasilan 3.000.000 – 4.000.000 sebanyak 27,5%. Responden yang berpenghasilan 2.000.000 – 3.000.000 sebanyak 22,5%, selanjutnya responden yang berpenghasilan 500.000 – 1.000.000 sebanyak 10%, yang berpenghasilan 4.000.000 - 5.000.000 sebanyak 10%, dan yang berpenghasilan 5.000.000 – 6.000.000 ada sebanyak 10%.

### **ANALISIS HUBUNGAN ANTAR VARIABEL**

#### **Hubungan Faktor Sosiologis dan Partisipasi Politik**

Dari hasil analisis korelasi (r) didapat korelasi antara Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Kota Pekanbaru (Y) dengan Faktor Sosiologis (X1) (r) adalah 0,171. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sangat rendah antara Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Kota Pekanbaru (Y) dengan Faktor Sosiologis (X1). Sedangkan arah hubungan adalah positif karena nilai r positif, berarti semakin tinggi ikatan Sosiologis (X) masyarakat maka semakin tinggi Partisipasi Politik (Y).

#### **Hubungan Faktor Psikologis dan Partisipasi Politik**

Dari hasil analisis korelasi (r) didapat korelasi antara Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Kota Pekanbaru (Y) dengan Faktor Psikologis (X2) (r) adalah 0,338. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang rendah antara Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Kota Pekanbaru (Y) dengan Faktor Psikologis (X2). Sedangkan arah hubungan adalah positif karena nilai r positif, berarti semakin tinggi ikatan Psikologis (X2) masyarakat maka semakin tinggi Partisipasi Politik (Y).

#### **Hubungan Faktor Rasional dan Partisipasi Politik**

Dari hasil analisis korelasi (r) didapat korelasi antara Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Kota Pekanbaru (Y) dengan Faktor Rasional (X3) (r) adalah 0,544. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sedang antara Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Kota Pekanbaru (Y) dengan Faktor Rasional (X3). Sedangkan arah hubungan adalah positif karena nilai r positif, berarti semakin tinggi faktor Rasional maka semakin tinggi Partisipasi Politik (Y).

### Hubungan Faktor Administrasi Pada DPT dan Partisipasi Politik

Dari hasil analisis korelasi ( $r$ ) didapat korelasi antara Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Kota Pekanbaru (Y) dengan Faktor Administrasi Pada DPT (X4) menunjukkan hasil yang konstan karena seluruh responden menyatakan jawaban yang sama.

### Hubungan Faktor Kerja KPU dan Partisipasi Politik

Dari hasil analisis korelasi ( $r$ ) didapat korelasi antara Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Kota Pekanbaru (Y) dengan Faktor Kerja KPU (X5) ( $r$ ) adalah 0,414. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sedang antara Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Kota Pekanbaru (Y) dengan Faktor Kerja KPU (X5). Sedangkan arah hubungan adalah positif karena nilai  $r$  positif, berarti semakin tinggi Faktor Kerja KPU (X5) maka semakin tinggi Partisipasi Politik (Y).

### Hubungan Faktor Kerja Calon dan Partisipasi Politik

Dari hasil analisis korelasi ( $r$ ) didapat korelasi antara Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Kota Pekanbaru (Y) dengan Faktor Kerja Calon (X6) ( $r$ ) adalah 0,317. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang rendah antara Faktor Kerja Calon (X6) dengan Partisipasi Politik (Y).

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

- a. Respon masyarakat Kota Pekanbaru dalam mengikuti pilkada tahun 2017 dapat disimpulkan tinggi dalam berpartisipasi. Faktor Rasional adalah faktor yang paling berpengaruh dalam partisipasi politik masyarakat Kota Pekanbaru.
- b. Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data yang telah dikemukakan dalam penghitungan koefisien korelasi menunjukkan Kerja KPU memiliki nilai positif dengan partisipasi politik. Artinya semakin tinggi Kerja KPU maka semakin tinggi hubungan dalam Partisipasi Politik pada masyarakat Kota Pekanbaru

### **Saran**

- a. Bagi pihak penyelenggara pemilihan (KPU) dan partai politik, sangat penting untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan hak pilih pada Pemilihan Kepala Daerah, hal ini sangat berguna untuk menyukseskan sistem Demokrasi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.
- b. Bagi partai politik untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula maka diperlukan beberapa upaya:
  - 1) Mengoptimalkan fungsi partai politik sebagai sarana aspirasi masyarakat.
  - 2) Memperbanyak aksi-aksi sosial kemasyarakatan.

- 3) Terlibat aktif dalam mendorong dan mendukung kegiatan komunitas atau kelompok masyarakat.